

BAB I

PENDAHULUAN

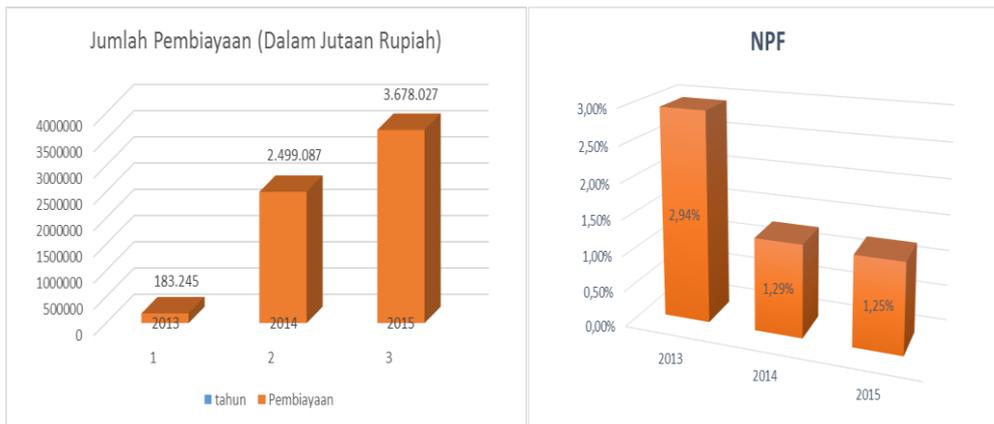
A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang RI Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008). Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan diharapkan mampu untuk memenuhi pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk penyaluran dana yang ditawarkan.

Dalam operasionalnya, Bank harus menyalurkan dana yang telah mereka himpun dengan tepat guna dan sesuai dengan perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Semakin meningkat perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan, Bank juga harus meningkatkan analisa manajemen pembiayaan dalam menangani kemungkinan terburuk apabila di kemudian hari terdapat pembiayaan bermasalah. Perkembangan dan persaingan antar Perbankan Syariah dalam memberikan layanan pembiayaan semakin beragam, salah satu contohnya adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, yang menghadirkan produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yaitu program pembiayaan terpadu dan produktif berdasarkan akad *wakalah wal murabahah* yang diperuntukkan bagi sekelompok wanita di pedesaan yang telah memiliki usaha atau untuk membangun suatu jenis usaha, tetapi tidak memiliki tambahan modal dan akses ke dunia perbankan. Program pembiayaan PMD ini lahir untuk membantu keluarga pra

sejahtera dalam membangun dan mengelola usahanya, sehingga pembiayaan PMD hanya difokuskan untuk pembiayaan usaha produktif. Dimana dana yang disalurkan kepada setiap nasabah dapat digunakan untuk mengelola jenis usaha, sehingga dana tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan baik bagi nasabah itu sendiri dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukan maupun bagi pihak bank dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan serta bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Di samping itu BTPN Syariah secara rutin terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan demi tercapainya program pemberdayaan PMD yang berkelanjutan dan terukur, sehingga pemberian pembiayaan tersebut sesuai sasaran (<http://www.btpnsyariah.com/produk>).

Pembiayaan mikro untuk usaha kecil menengah yang diberdayakan oleh PT. BTPN Syariah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan hidup dengan mengembangkan potensi diri melalui usaha yang dijalankan, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan BTPN Syariah pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan penghargaan sebagai Bank Umum Syariah Terbaik Pertama dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi Kategori Buku 1 dan 2 dari *The 11th Islamic Finance Awarding 2015* dan *The 12th Islamic Finance Awarding 2016*, sebagai Bank Umum Syariah dengan Profitabilitas Tertinggi pada acara *Islamic Finance Awarding* dan penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM 2016 Terbaik 1 Kategori Buku 1 dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 2016 lalu (<https://www.btpnsyariah.com/berita-media/penghargaan/61-penghargaan-2015>).



Sumber : Laporan Tahunan BTPN Syariah 2015

Gambar 1.1 Jumlah Pembiayaan

Gambar 1.2 NPF BTPN Syariah

Dari penghargaan-penghargaan yang telah diraih, data penyaluran pembiayaan yang diberikan BTPN Syariah dan pembiayaan bermasalah (*NPF Gross*) pada diagram di atas, maka dapat diketahui BTPN Syariah berusaha terus meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat pra-sejahtera di seluruh Indonesia dengan menyalurkan dana PMD mencapai 3.678.027 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2015 dan menekan *NPF* di bawah rata-rata perbankan syariah dari tahun 2013 yaitu sebesar 2,94 persen menjadi 1,25 persen di tahun 2015. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan, BTPN Syariah memiliki manajemen risiko yang baik dalam mengelola dan mengawasi penyaluran pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, karena menurut teori risiko bahwa semakin banyak dana yang disalurkan maka risiko yang akan ditanggung bank akan semakin besar (laporan keuangan, <https://www.btpnsyariah.com/>) dengan demikian “pendayagunaan sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi” (Muhammad, 2005:18).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008 dan Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Syariah dan 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menentukan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana pada produk pembiayaan bank syariah harus sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan serta diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Muhammad (2005:43) mengemukakan bahwa analisis kelayakan pembiayaan harus memperhatikan beberapa aspek administratif, sebagaimana yang diungkapkan:

”Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah: Surat Permohonan Pembiayaan, Proses Evaluasi, dan Proses Penilaian, Proses Administratif Pembiayaan, dan Pengamanan Pembiayaan.”

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana BTPN Syariah mengambil keputusan dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah PMD sehingga dapat meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah kemudian menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD) BTPN SYARIAH AREA TEMANGGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD)?
2. Bagaimana cara untuk meminimalisir dan mengatasi pembiayaan macet pada Paket Masa Depan (PMD)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana manajemen risiko yang diterapkan dan dijalankan pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT.BTPN Syariah, sedangkan tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD)
2. Mengetahui bagaimana cara untuk meminimalisir dan mengatasi pembiayaan macet pada Paket Masa Depan (PMD)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran pada dunia perbankan mengenai pentingnya analisis manajemen risiko terhadap pengajuan perencanaan pembiayaan oleh nasabah.
 - b. Sebagai sumbangan saran agar selalu memperhatikan risiko-risiko yang ditimbulkan sebelum dan sesudah keputusan pengajuan pembiayaan nasabah di terima.

2. Kegunaan Teoritik

- a. Memberikan gambaran secara nyata kepada Badan Usaha Syariah maupun Unit Usaha Syariah mengenai pentingnya menganalisa manajemen risiko terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- b. Memberikan pemahaman dan pengembangan wawasan khususnya bagi penulis dalam bidang Perbankan Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang menjadi sumber acuan untuk penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori berupa landasan-landasan teori yang digunakan untuk penelitian mengenai Bank Syariah, Kebijakan dan Teknik Pembiayaan di Bank Syariah, dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank Syariah.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan, konsep dan variabel penelitian, sumber data, lokasi dan subyek penelitian, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu mekanisme pelaksanaan pembiayaan PMD pada PT. BTPN Syariah dan bagaimana langkah yang digunakan dalam meminimalisir dan mengatasi pembiayaan macet pada PMD.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah dipaparkan.